



DJKN

KPKNL
PADANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPKNL PADANG 2024

Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Padang Timur - Kota Padang, Sumatera Barat
Telp.(0751)28299 Fax.(0751)21306

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
LATAR BELAKANG	6
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
RENCANA STRATEGIS	14
PERJANJIAN KINERJA	15
PENGUKURAN KINERJA	17
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA	17
ADENDUM KONTRAK KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA	21
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
KINERJA LAINNYA	40
ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO	57
RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2025	57
REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	65

PENGANTAR

Budaya good governance dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas good governance tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2024 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2024. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem balance scorecard (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2024, ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan full disclosure pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan

dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta dengan didorong oleh semangat One Team, One Spirit, One goal, KPKNL Padang selalu melakukan continuous improvement demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Padang



Ditandatangani secara elektronik

Ahid Iwanudin

NIP 197102261998031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di Kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.





DjKN

KPKNL
PADANG

BAB I **PENDAHULUAN**

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2024

BAB I – PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

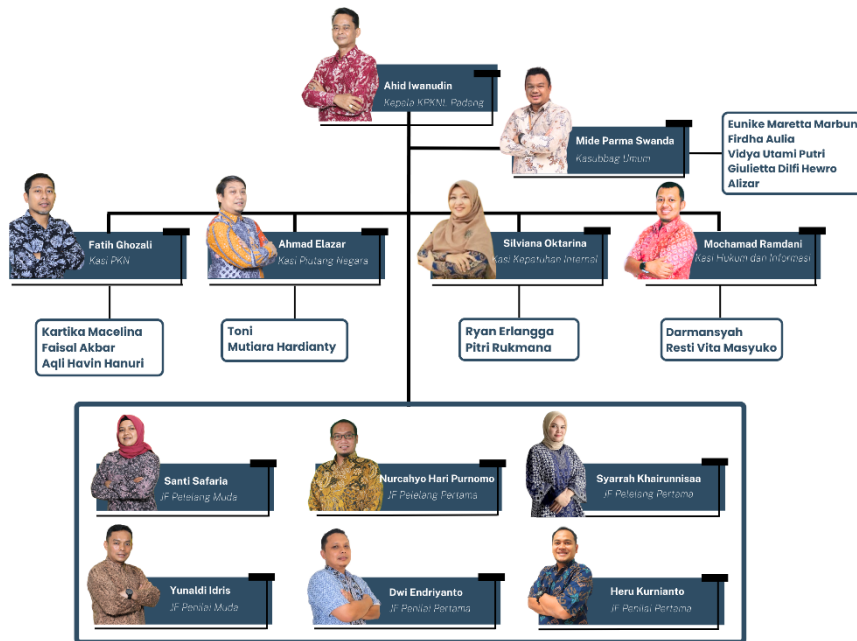
- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL

KPKNL Padang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi lima unit eselon IV dan satu unit kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- c. Seksi Piutang Negara
- d. Seksi Hukum dan Informasi
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai)

Diagram 1.1

Bagan Organisasi KPKNL Padang Tahun 2024



Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Padang, berdasarkan Data per-31 Desember 2023 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 29 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

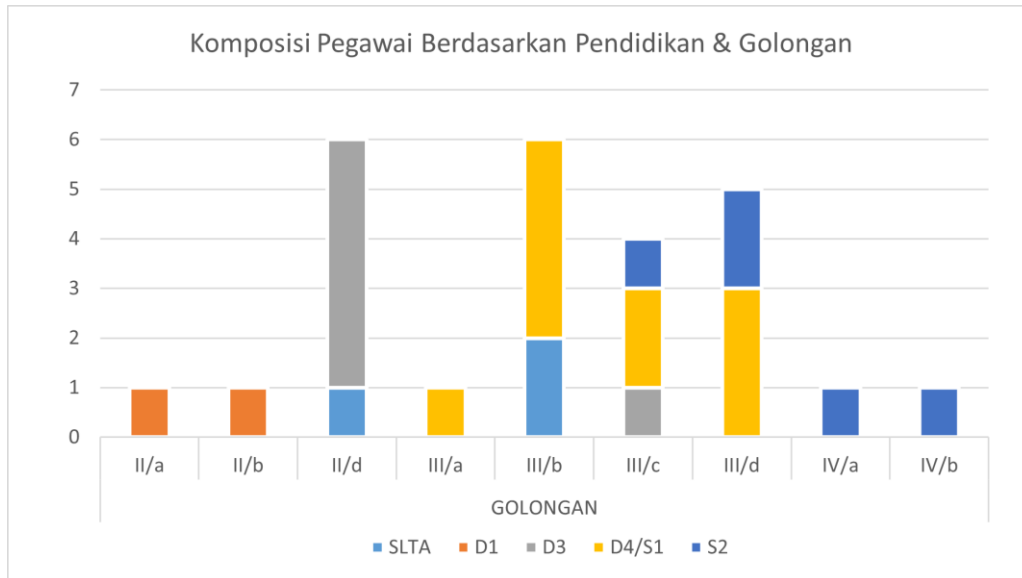
a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah 11 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 4 orang, dengan 1 orang diantaranya menduduki golongan III. Sementara lulusan DIII berjumlah 4 orang dan S2 berjumlah 9 orang, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

PENDIDIKAN	GOLONGAN								TOTAL (Orang)	
	II/a	II/b	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a		IV/b
SLTA			1		2					3
D1	1	1								2
D3			5			1				6
D4/S1				1	4	2	3			10
S2						1	2	1	1	5
Jumlah Pegawai (Orang)	1	1	6	1	6	4	5	1	1	26



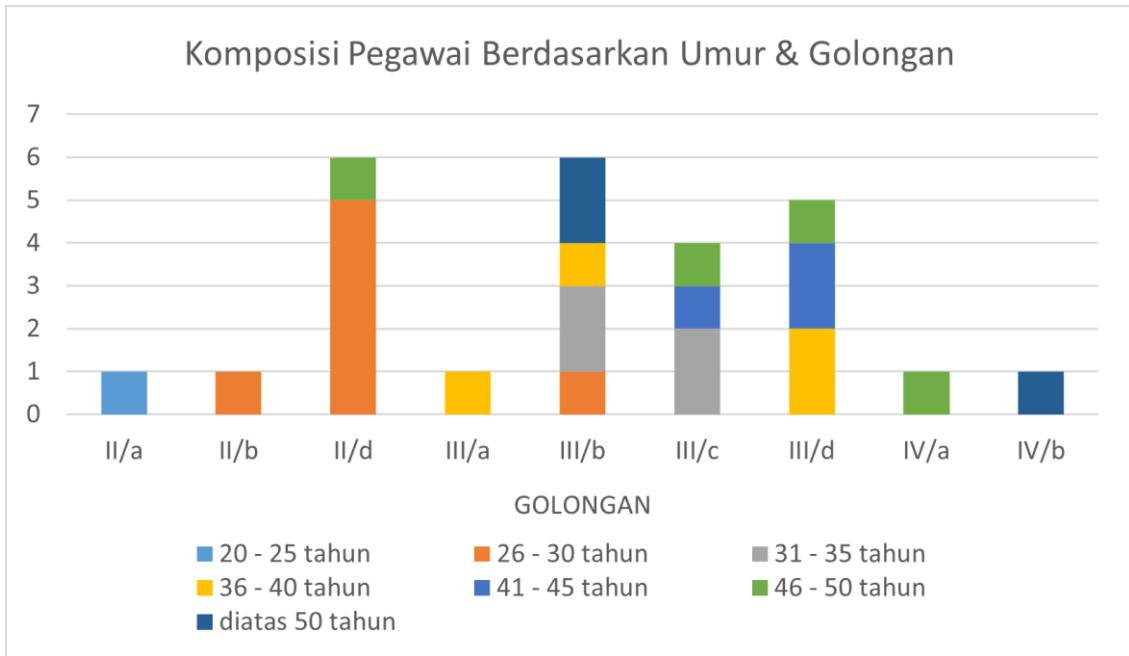
b. Berdasarkan Umur dan Golongan

KPKNL Padang dalam waktu dekat akan kehilangan banyak pegawai karena pensiun (usia diatas 50 tahun sejumlah 3 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 8 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 8 orang, dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 7 orang.

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

UMUR	GOLONGAN									TOTAL (Orang)
	II/a	II/b	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	
20 - 25 tahun	1									1
26 - 30 tahun		1	5		1					7
31 - 35 tahun					2	2				4
36 - 40 tahun				1	1		2			4
41 - 45 tahun						1	2			3
46 - 50 tahun			1			1	1	1		4
> 50 tahun					2				1	3
Jumlah Pegawai (Orang)	1	1	6	1	6	4	5	1	1	26



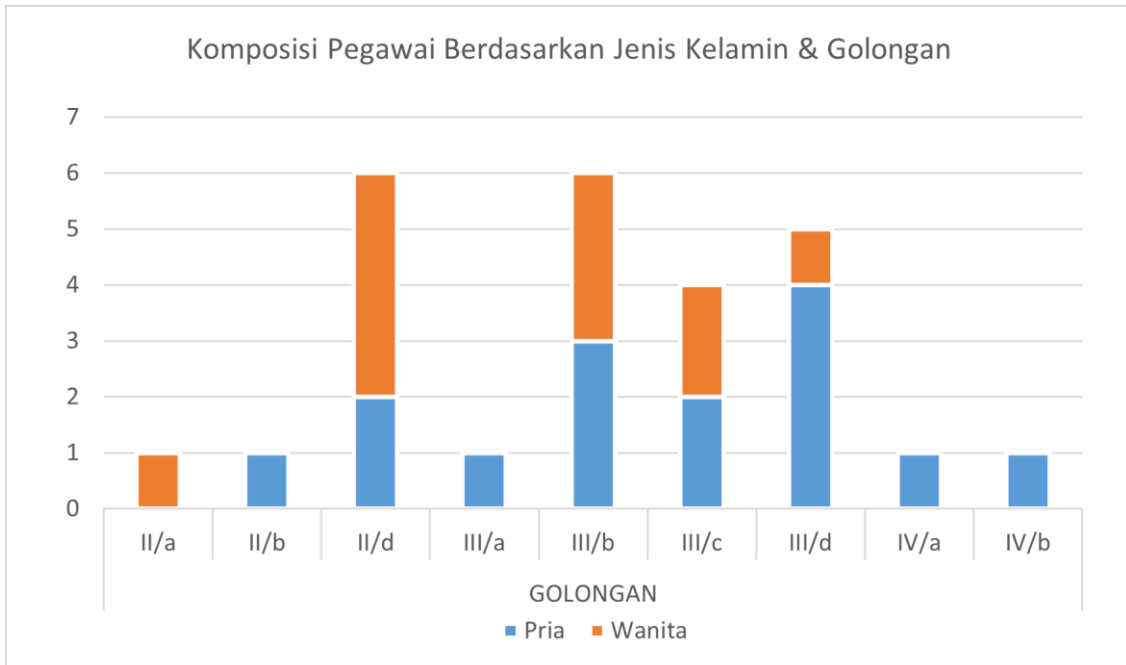
c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jika dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin dan golongan dapat dilihat bahwa pegawai KPKNL Padang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 15 orang dan 12 orang perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN									TOTAL (Orang)
	II/a	II/b	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	
Pria		1	2	1	3	2	4	1	1	15
Wanita	1		4		3	2	1			11
Jumlah Pegawai (Orang)	1	1	6	1	6	4	5	1	1	26



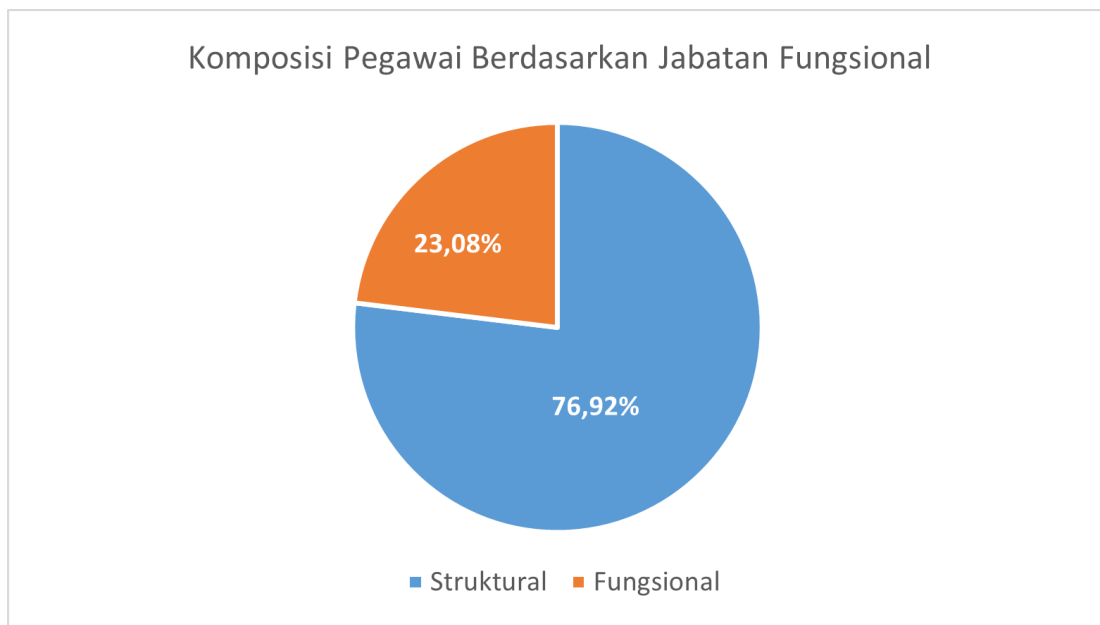
d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Agar dapat menyediakan pelayanan secara maksimal, KPKNL Padang memiliki pegawai yang terdiri dari dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Saat ini, pegawai dengan jabatan struktural berjumlah 20 orang dan pegawai yang memiliki kompetensi fungsional berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi kelompok JF Pelelang dan JF Penilai.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

JENIS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
Struktural	20
Fungsional	6
TOTAL	26



Tabel 1.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

UNIT KERJA	TERAMPIL	PERTAMA	MUDA	MADYA	JUMLAH
Kelompok JF Pelelang	0	2	1	0	3
Kelompok JF Penilai	0	2	1	0	3
TOTAL	0	4	2	0	6



DJKN

KPKNL
PADANG

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2024

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

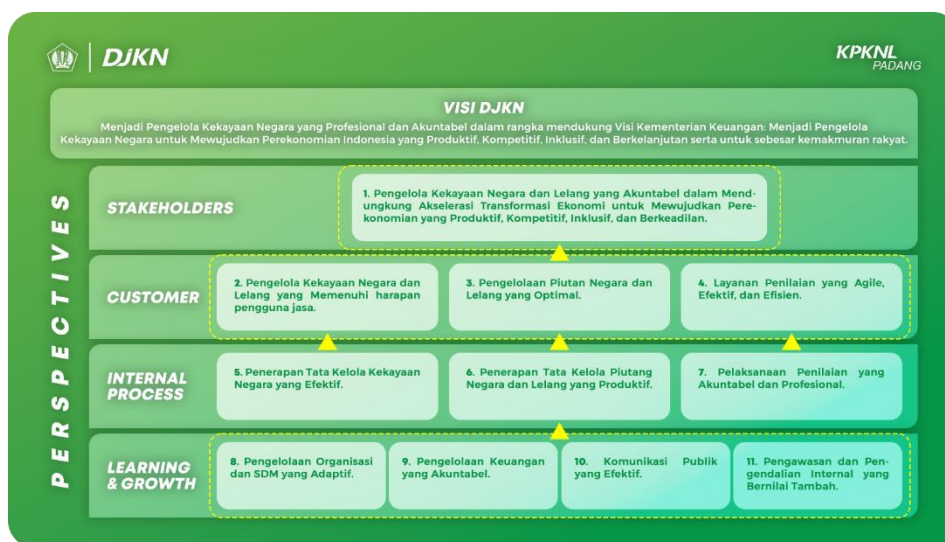
- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.

- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2023 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2018, terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

PETA STRATEGI



KONTRAK KINERJA

Tabel 2.1

Kontrak Kinerja KPKNL Padang

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Indeks Integritas	89,17
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp10,27 M)

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp89,85 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp1,88 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62 (138)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap triwulannya.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reuiu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

ADENDUM KONTRAK KINERJA

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Perubahan indikator kinerja utama yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: PK-01A/WKN.03/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Program: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

SEMULA			MENJADI		
	INDIKATOR KINERJA	TARGET		INDIKATOR KINERJA	TARGET
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100

Tabel 2.3

Sasaran Program: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

SEMULA			MENJADI		
INDIKATOR KINERJA		TARGET	INDIKATOR KINERJA		TARGET
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Sedangkan perubahan indikator kinerja utama yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: PK-01B/WKN.03/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sasaran Program: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

SEMULA			MENJADI		
INDIKATOR KINERJA		TARGET	INDIKATOR KINERJA		TARGET
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (1,88 M)	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (3,35 M)

Tabel 2.5

Sasaran Program: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

SEMULA			MENJADI		
INDIKATOR KINERJA		TARGET	INDIKATOR KINERJA		TARGET
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62 (138)	6a-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	51 (113)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Perubahan rincian target kerja atau *trajectory* yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: PK-01A/WKN.03/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perubahan Rincian Targer Kerja Adendum Perjanjian Nomor: PK-01A/WKN.03/2024

KODE IKU	IKU	SEBELUM				MENJADI			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	89,17%	10%	20%	30%	89,17%
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	60%	71,5%	30%	50%	75%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	86,5%	10%	45%	60%	86,5%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	-	40%	60%	100%	20%	40%	60%	100%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25%	55%	75%	100%	25%	55%	88%	100%
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	81%	62%	96%	70%	63%	62%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	75%	90%	45%	60%	80%	90%
11a-N	Indeks Efektivitas UKI (Unit Kepatuhan Internal)	-	-	-	82%	5%	15%	20%	82%
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan perubahan rincian target kerja atau *trajectory* yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: PK-01B/WKN.03/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perubahan Rincian Targer Kerja Adendum Perjanjian Nomor: PK-01B/WKN.03/2024

KODE IKU	IKU	SEBELUM				MENJADI			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	70%	63%	62%	96%	70%	63%	51%



DJKN

KPKNL
PADANG

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2024

BAB III – AKUNTABILITAS KERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 terhadap 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang maka diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang ditentukan. Berikut rincian capaian kinerja atas 11 IKU KPKNL Padang tahun 2024:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padang Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE (30%)						
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Indeks Integritas	89,17%	92,44%	103,66%
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100,50%	100,50%
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)						
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	93,38%	120%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100%	115,61%
3	Pengelolaan Piutang Negara yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	91,55%	91,55%

		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	145,74%	120%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%	106%	120%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)						
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100%	120%	120%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%	122,67%	120%
		5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi Idle	100%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62%	28,25%	120%
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%	116,25%	120%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,01%	120%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)						

8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%	98,67%	116,09%
		8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	113,5%	120%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120%	120%
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	120%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%	100%	120%
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82%	96,97%	118,26%
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100%	120%	120%
NILAI KINERJA ORGANISASI						112,93%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp2.512.655.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp2.406.849.111

Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp105.815.889

Pada tahun 2024, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,93%. Dari 20 IKU terdapat 1 IKU yang capaiannya kuning, yaitu IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,80% dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 sebesar 112,13%. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Integritas

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. Pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. Pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. Bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. Biaya permohonan lelang,
- d. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

"Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian

penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara."

b. Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang

telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

KATEGORI	JENIS PERSETUJUAN UTILISASI	KRITERIA SUDAH DITINDAKLANJUTI
Penggunaan	Alih Status Penggunaan	Berita Acara Serah Terima
	Penggunaan Sementara	Perjanjian Penggunaan Semerara antara K/L pemilik BMN dan K/L pengguna sementara
	Pengoperasian oleh Pihak Lain	Perjanjian Pengoperasian oleh Pihak Lain (sesuai dengan pasa 19 PMK No 246/PMK.06/2014 jo 87/PMK.06/2017 jo 76/PMK.06/2019)
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa; 2. SSBP; atau 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL.
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian; atau 2. Berita acara serah terima.
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang; 2. Risalah Lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat); 3. dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; atau 4. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang

		pengganti; atau 3. Pengumuman/Pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

Untuk target tahun 2024 pada KPKNL Padang terdapat 105 persetujuan yang ditelaah ditindaklanjuti kesemuanya sebanyak 105 persetujuan.

Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara yang Optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp89.854.000.000.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDP/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100%

Pada tahun 2024 KPKNL Padang mendapat target sebesar Rp3.346.200.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp4.876.684.995. Capaian realisasi tersebut dapat

memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang.

Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)

4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/atau bantuan teknis penilaian.

Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertifikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat (termasuk yang berstatus Bersertifikat Lainnya), dengan output Sertifikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimbingan teknis, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

c. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi Idle

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, Inventarisasi BMN eks BMN Idle, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Idle di Pengelola Barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN Idle guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel.

Data yang digunakan sebagai input pelaksanaan kegiatan inventarisasi di tahun 2024 adalah Daftar Barang Pengelola unaudited per 31 Desember 2023 dan kegiatan inventarisasi dilaksanakan terhadap seluruh BMN eks BMN idle yang terdaftar.

Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan inventarisasi:

KEGIATAN KPKNL	OUTPUT KPKNL
A. TAHAPAN PERSIAPAN OLEH KPKNL	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Inventarisasi 	a. SK Tim Inventarisasi

<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan SK Tim Inventarisasi • Penyiapan dokumen sumber • Pemetaan lokasi aset • Penyiapan Kertas Kerja Inventarisasi • Penyusunan rencana kerja inventarisasi 	<p>b. Daftar Barang Pengelola KPKNL</p>
<p>B. TAHAPAN PELAKSANAAN OLEH KPKNL</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan fisik aset • Identifikasi kondisi • Validasi data awal dengan detil aset • Klarifikasi status kepemilikan aset • Identifikasi potensi tindak lanjut pengelolaan BMN • Identifikasi permasalahan aset • Dokumentasi inventarisasi 	<p>a. Kertas Kerja Inventarisasi</p> <p>b. Isian Form Inventarisasi</p>
<p>C. TAHAPAN PELAPORAN OLEH KPKNL</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Berita Acara Hasil Inventarisasi • Penyusunan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi • Penyusunan Daftar Kondisi Barang Hasil Inventarisasi 	<p>a. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p> <p>b. ND penyampaian LHI KPKNL ke Kanwil</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Tidak Ditemukan • Penyusunan Kertas Kerja Inventarisasi • Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut Pengelolaan • Penyusunan Catatan atas Hasil Inventarisasi (apabila diperlukan) • Penyusunan Surat Keterangan dari Kepala KPKNL mengenai kebenaran hasil inventarisasi 	
D. TINDAK LANJUT OLEH KPKNL	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data, pembukuan dan pendaftaran hasil inventarisasi pada Daftar Barang Pengelola pada periode pelaporan berikutnya 	Daftar Barang Pengelola termutakhir Periode pelaporan berikutnya

KPKNL Padang pada tahun 2024 telah melakukan semua tahapan kegiatan inventarisasi atau 100% terhadap semua BMN idle yang ada pada KPKNL Padang

Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL)
2. BKPN Penarikan (SPPNS)
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat) Target 100% (160 BKPN).

b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi presentase produktifitas lelang mencapai 116,25% dari target yang ditetapkan sebesar 89%. Sejak tahun 2024 jumlah frekwensi lelang tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah risalah lelang melainkan dihitung berdasarkan jumlah lot barang yang dilelang.

Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah

hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai Kementerian Keuangan.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, maka diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

b. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%
Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis

pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi public dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Capaian pada TW 1 2024 mencapai 86,96 poin dari target 80 poin, sedangkan untuk TW 2 s.d. TW 4 2024 capaian IKU sebesar 100 poin.

Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Efektivitas UKI (Unit Kerja Internal)

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan

11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

b. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satekernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

KINERJA LAINNYA

Selain dari 20 (dua puluh) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. 60 Debitur Mengikuti Crash Program Keringanan Utang

Crash Program adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membantu beberapa pihak yang memiliki utang dengan cara memberikan keringanan pembayaran piutang atau crash program. Pihak-pihak yang dimaksud adalah debitur yang jumlah piutangnya bisa dibilang sedikit atau kecil. Tahun 2024 tertotal 60 debitur yang telah mengikuti crash program keringanan utang dengan nilai Outstanding BKPN yang telah terbit Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebesar Rp2.557.749.044,-

(Dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah) dan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) dengan nilai CP yang telah dibayarkan oleh 60 debitur yaitu sebesar Rp1.827.695.648,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

2. Sosialisai Lelang Wajib Barang Milik Daerah (BMD) guna terwujudnya pengelolaan BMD yang baik pada Pemko Padang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang memenuhi undangan Sekretaris Daerah Kota Padang sebagai Narasumber pada acara sosialisasi Lelang Barang Milik Daerah Kota Padang yang bertempat di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balai Kota Air Pacah Padang. Dalam hal ini koordinator pelelang KPKNL Padang, M. Waliyul Azman Nur Ritongan ikut hadir.

Materi pertama disampaikan oleh Amas Kenaekan Nasution, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Padang dengan materi Lelang Wajib BMD. Amas menyampaikan Siklus pengelolaan BMD dimulai dari proses penatausahaan BMD diawali dengan proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian, proses penilaian dan pemindahtanganan melalui lelang.

Acara dilanjutkan dengan paparan oleh Muhammad Firmansyah, Fungsional Penilai Ahli Muda KPKNL Padang terkait materi seputar prosedur lelang tahapan dan tata cara tata cara pendaftaran akun lelang. Setelah pemaparan semua materi berakhir, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung antusias dan interaktif, narasumber memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Sosialisasi dimaksudkan dan bertujuan untuk menambah pengetahuan personil Pemko Padang tentang Lelang baik selaku Pemohon Lelang, maupun selaku Peserta Lelang, khususnya Lelang Wajib BMD, sehingga nanti kedepannya penataan dan pengelolaan BMD dapat berjalan dengan baik.



3. Sosialisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan TA 2024

KPKNL Padang mengadakan kegiatan Sosialisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang bertempat di Aula KPKNL Padang. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin dan di Moderatori Kepala Seksi Piutang Negara, Fatih Ghozali serta dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja yang menjadi target pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2024 yaitu 20 satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI.

Target pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2024 pada KPKNL Padang sebanyak 1.971 NUP. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, sedangkan maksud dan tujuan dari pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) adalah memastikan aset Negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (the highest and best use principle) dengan sasaran strategisnya berupa terwujudnya pengelolaan Kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara.



4. Kemenkeu Goes to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2024

Kemenkeu Goes To campus yang disingkat KGTC bertujuan untuk mengedukasi, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi terkait APBN khususnya kepada generasi muda, terkait kebijakan-kebijakan APBN. Sebagai informasi, KGTC kali ini merupakan KGTC pertama yang kami selenggarakan di tahun 2024 ini. Dapat dikatakan bahwa KGTC kali ini merupakan kegiatan yang sangat spesial, karena kegiatan kali ini merupakan kegiatan pembuka dari beberapa rangkaian KGTC di tahun 2024 ini.

Sebelum dimulai rangkaian KGTC, diputar terlebih dahulu video sambutan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Lalu dilanjutkan sambutan dari Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. serta acara dibuka secara resmi oleh Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran, Rofyanto Kurniawan.

Acara KGTC dibagi dalam dua sesi, sesi pertama dengan tema Kinerja dan Tantangan APBN dimoderatori oleh Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Arief Masdi dengan narasumber sebagai berikut:

1. Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, Agung Hidayata dan
2. Kasubdit Peraturan dan Dukungan Teknis PNBPN SDA KND, Frengky Setiawan.

Sesi kedua mengangkat tema Ekonomi Regional dan Manfaat APBN yang dimoderatori oleh Idha Sendary Putri dari Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dengan narasumber sebagai berikut:

1. Joko Supriyanto selaku Kepala KPPN Padang;
2. Reza Pranata Putra, Dosen pada PKN STAN; dan
3. Dr. Davy Hendri, S.E., M.Si. selaku wakil Dekan III FEBI UIN Imam Bonjol

Rangkaian acara diakhiri sesi tanya jawab yang cukup antusias dari para mahasiswa yang hadir sehingga acara melewati batas waktu yang telah ditentukan. Semoga dengan hadirnya KGTC di Sumbar khususnya kota Padang menjadi ajang literasi penganalan APBN bagi masyarakat terutama mahasiswa yang mana ditahun 2045 menjadi generasi emas yang menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera.



5. Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024

Senin, 22 April 2024 bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kanwil BPN Sumbar), diadakan Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Sumbar. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sumbar, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kepala KPKNL Padang, Kepala KPKNL Bukittinggi, Para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Para Kepala Satuan Kerja (Satker).

Acara ini bertujuan untuk monitoring atas progress dan capaian serta evaluasi terhadap pelaksanaan sertipikasi di lapangan dan pembahasan mengenai kendala berikut solusinya. Kanwil BPN Sumbar dalam Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024 untuk kategori K1 (Clean and Clear, data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkar), memiliki target sebanyak 204 bidang yang tersebar di 8 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk target KPKNL Padang sebanyak 156 bidang yang tersebar di 5 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat beberapa kendala dalam program percepatan sertipikasi seperti belum dilakukan pengajuan dokumen dikarenakan belum lengkap, belum adanya DIPA Pendampingan dan lainnya. Kemudian, Para Kepala Kantah yang hadir memberikan saran dan tanggapan terkait permasalahan tersebut sehingga proses sertipikasi ini dapat dituntaskan. Selanjutnya, KPKNL Padang akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut dengan melaporkan secara berjenjang ke pimpinan. Karena dalam kegiatan ini membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan para pihak terkait mulai dari Satker, Kantah, Kanwil BPN, K/L dan lainnya.



6. *Sharing Knowledge & Edukasi Komunikasi* LELANG HAK MENIKMATI

KPKNL Padang melaksanakan *Sharing Knowledge* dan Edukasi Komunikasi LELANG HAK MENIKMATI dengan tema "Gali Potensi untuk Optimalisasi". Dalam sambutan Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin menjelaskan core business KPKNL Padang kepada peserta yang hadir diantaranya Pengurusan Piutang Negara, Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Beliau juga berpesan kepada stakeholder penerima layanan KPKNL padang untuk tidak menjanjikan atau memberikan gratifikasi kepada petugas KPKNL Padang dan sama-sama mewujudkan budaya integritas bersama.

Hadir pejabat dari Direktorat Lelang Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara secara daring, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdit Kebijakan Lelang, Iwan Victor Leonardo yang dalam opening speech nya berpesan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga serta satker untuk dapat meningkatkan potensi aset yang dikelolanya baik yang berwujud maupun tidak berwujud melalui upaya Lelang Hak Menikmati. Kabid Lelang Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, Acep Hadinata menjelaskan dalam keynote speech nya bahwa potensi lelang dari tahu ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan sebagai pencapaian PNBPN, apalagi metode lelang sudah dijalankan semenjak 116 tahun yang lalu sebelum masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Acara *Sharing Knowledge* dan Edukasi Komunikasi kali ini dilaksanakan secara hybrid, yang mana peserta lingkup Pemprov/Pemkab/Pemkot wilayah kerja KPKNL Padang hadir secara luring di Aula KPKNL Padang, sedangkan peserta K/L atau Satker mitra kerja KPKNL padang hadir secara daring melalui aplikasi Ms-team dikarenakan kapasitas ruangan yang terbatas. Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut yakni:

1. Kepala Seksi Piutang Negara, Ahmad Elazar
2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Fatih Ghozali
3. Pejabat Fungsional Penilai Ahli Muda, Yunaldi Idris
4. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda, Muhammad Firmansyah

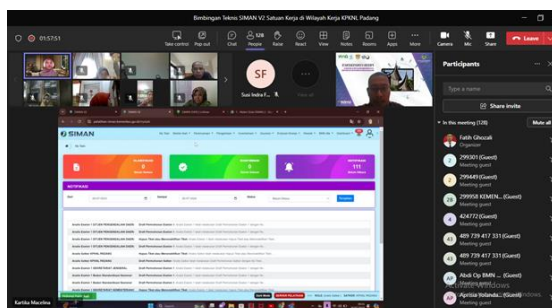
Semoga dengan kegiatan Sharing Knowledge dan Edukasi Komunikasi kali ini selain meningkatkan awareness atas pengelola barang juga mengubah pola pikir bahwa aset sebagai revenue center serta dapat meningkatkan PAD di daerah serta kontribusi positif bagi PNBP K/L atau satker.



7. Bimbingan Teknis SIMAN v2 Sebagai Persiapan Implementasi SIMAN v2 Kepada Kementerian/Lembaga dalam Klaster 1 dan Klaster 2

KPKNL Padang mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIMAN v2 Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilaksanakan secara hybrid yakni bertempat di Ruang Rapat Kepala KPKNL Padang untuk peserta luring dan menggunakan aplikasi Ms Team untuk peserta daring,

Kegiatan ini diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) peserta yakni operator BMN pada Satuan Kerja pada Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, khususnya dalam Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi. Transformasi digital Kemenkeu merupakan suatu peluang untuk penyempurnaan proses bisnis guna peningkatan value layanan dan mendorong efisiensi proses bisnis Kemenkeu.



8. Rapat Koordinasi Inventarisasi ABMA/T Wilayah Sumatera Barat

Kantor Wilayah Ditekn Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) bersama KPKNL Padang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Asistensi Daerah Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Wilayah III Pekanbaru yang berada di Sumatera Barat. Rakor yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Aula KPKNL Padang membahas terkait progres implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 jo. PMK 182/PMK.6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

Objek yang menjadi sasaran Inventarisasi ABMA/T pada Rakor kali ini adalah seluruh ABMA/T dalam Lampiran PMK Nomor 62 Tahun 2020 pada wilayah kerja Tim Asistensi Daerah (TAD) bersangkutan yang belum dilakukan penyelesaian baik secara sebagian dan/atau seluruhnya, yang mana Inventarisasi ABMA/T dilaksanakan oleh TAD dan dapat di dampingi oleh Tim Penyelesaian, serta Instansi terkait dan/atau tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan seperti petugas dari Kantor Pertanahan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin dengan didampingi Kepala Seksi PKN II Kanwil DJKN RSK, Said Sjafrizal serta dihadiri para undangan, diantaranya:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Alim Bastian;
2. Perwakilan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Perwakilan dari Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat;
5. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
6. Perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang;
7. Lurah Berok Nipah;
8. Lurah Belakang Tangsi; dan
9. Lurah Belakang Pondok.

Rakor TAD wilayah Sumatera Barat ini membahas inventarisasi ABMA/T atas 3 Objek Aset yaitu: Yayasan Prayoga, Yayasan Pendidikan Murni dan Yayasan Kalam Kudus yang semua objek berada di Kota Padang. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada permintaan masukan terkait persiapan inventarisasi dan usulan penyelesaian dari ketiga aset tersebut.

Dihari berikutnya, Kamis (08/08) TAD melakukan kunjungan ke Objek ABMA/T dimaksud sekaligus silaturahmi dengan pengurus yayasan tersebut dalam rangka memperoleh data /informasi yang akan digunakan dalam pemutakhiran data ABMA/T.



9. Konsultasi Publik RUU Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Ditjen Kekayaan Negara bersama Kemenkeu Satu Sumbar mengadakan Konsultasi Publik RUU Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) di Kampus Pascasarjana Universitas Andalas. Hadir sebagai pembahas yakni Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Lain-lain, Yoshua Wisnungkara beserta pembahas dari Universitas Andalas yakni Wakil Rektor III Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum dan Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Sekolah Pascasarjana, Mahdi, SP. MSi. Ph.D.

Acara yang berlangsung secara hybrid yakni untuk daring melalui aplikasi zoom dan chanel youtube Direktorat PKKN DJKN dan untuk luring di Aula Gedung Sekolah Pascasarjana lantai 3 Universitas Andalas, Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Acara dibuka secara resmi melalui daring oleh Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan.

Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin dalam sambutannya mewakili Kemenkeu Sumbar menjelaskan Kegiatan konsultasi publik ini merupakan langkah penting dalam menyempurnakan substansi RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, yang disusun sebagai respon terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif, adil, dan transparan dalam pengelolaan kekayaan negara kita. RUU ini mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk kekayaan negara yang dikuasai maupun yang dimiliki, dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Beliau juga mengharapkan peran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya memenuhi standar hukum yang tinggi, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi pengelolaan sumber daya negara kita.



10. DJKN Goes to Campus 2024

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga aset negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang menggelar acara “DJKN Goes to Campus” di Universitas Andalas. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc berlangsung meriah dan berhasil menarik minat ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan sehingga kapasitas Auditorium Gedung I terisi penuh.

Pada sambutan Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin menjelaskan DJKN Goes To Campus adalah kegiatan tahunan yang dilakukan KPKNL Padang, yang mana di tahun 2023 telah mengadakan di kampus Universitas Negeri Padang. beliau menjelaskan terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang yakni:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara (BMN);
2. Pengurusan Piutang Negara;
3. Pelayanan Lelang; dan
4. Pelayanan Penilaian

DJKN Goes to Campus kali ini KPKNL Padang melakukan sinergi dengan unit eselon I Kemenkeu lainnya, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh pihak Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sumbar, Budi Lesmana sebagai opening speech tentang APBN. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sivitas akademika mengenai pengelolaan aset negara. Melalui berbagai kegiatan yang menarik, peserta diajak untuk terlibat aktif dan merasakan langsung bagaimana proses lelang berlangsung. Peserta mendapatkan materi terkait dengan kebijakan pengelolaan aset negara, peran DJKN dalam menjaga aset negara, dengan fokus kepada Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian BMN dan Lelang, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Materi-materi ini disampaikan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga peserta dapat memperoleh informasi yang akurat dan up to date.

Salah satu kegiatan yang paling dinantikan adalah simulasi lelang. Dalam simulasi ini, peserta berperan sebagai peserta lelang sungguhan yang saling bersaing untuk mendapatkan barang yang dilelang. Kegiatan ini tidak hanya seru, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme lelang dan pentingnya penilaian aset yang objektif. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga dan mengembangkan aset-aset negara. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan aset negara, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan negara, baik saat mereka sudah bekerja maupun ketika menjadi pemimpin di masa depan.



11. Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2025 dan Forum Konsultasi Publik KPKNL Padang

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi BMN berupa tanah dalam rangka penuntasan pensertipikatan tahun 2025 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-22/KN/KN.2/2024, dimana KPKNL diminta melakukan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi BMN berupa tanah dan memastikan hasilnya dikirimkan ke Kantor Pusat DJKN paling lambat tanggal 30 September 2024. Hasil dari rapat hari ini satuan kerja diminta untuk menyiapkan data alas hak/dokumen kepemilikan awal serta usulan sertifikasi tahun 2025 beserta dengan penyiapan usulan dana pendampingan ke Kantor Pusat masing-masing satuan kerja serta jumlah usulan bidang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pendampingan, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang akan melakukan pendampingan ke lapangan serta koordinasi awal dengan Kantor Pertanahan setempat terkait kemungkinan dapat terlaksananya pensertifikatan pada bidang yang akan diusulkan.

Pada sesi berikutnya, dilaksanakan forum konsultasi publik terkait tugas dan fungsi serta layanan yang diberikan oleh KPKNL Padang khususnya terkait pengelolaan kekayaan Negara. Pada kesempatan kali ini perwakilan satuan kerja menyampaikan apresiasi terhadap layanan yang telah diberikan oleh KPKNL Padang dan memberikan

masukannya terkait penambahan sesi sosialisasi SIMAN V2 kepada satuan kerja, dimana sosialisasi yang telah dilakukan KPKNL Padang selama ini dirasa kurang durasi waktunya dan terlalu banyak peserta dalam satu waktu sosialisasi. Semoga dengan adanya forum ini konsultasi dan sinergi antar satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terjaga dengan baik.



12. Sosialisasi Service Excellent

KPKNL Padang telah mengadakan Sharing Ilmu dan Kompetensi (SIKo) berupa Sosialisasi Service Excellent yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 bertempat di ruang Aula Lt. II KPKNL Padang. Agenda yang dibahas dalam kegiatan ini adalah terkait implementasi service excellent dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada KPKNL Padang dan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan.

Kegiatan ini dihadiri dan diikuti Para Pejabat Struktural/Fungsional, Para Pegawai Pelaksana dan PNP lingkungan KPKNL Padang. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin. Dalam sambutannya beliau menjelaskan pentingnya implementasi service excellent pada KPKNL Padang untuk memperkuat hubungan dengan stakeholder atau pengguna layanan.

Penyampaian Materi disampaikan oleh Ansie Mirsa Ferdiane selaku Service Quality Officer pada Bank Mandiri Persero (Tbk) Area Padang. Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa poin-poin terkait implementasi service excellent, yaitu sebagai berikut:

1. Service Mindset dalam hal ini disebutkan bahwa perlu dibentuk mindset terkait apa itu service/layanan. Pelayanan bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan utama dari pengguna layanan tapi juga mencakup kebutuhan personal yang dapat memberikan kesan positif bagi pengguna layanan. Kesan positif ini dapat memberikan dampak seperti kepuasan pengguna layanan dan positive image bagi kantor, sebaliknya kesan

negatif akan memberi dampak seperti kekecewaan pengguna layanan, nama buruk bagi kantor, dan terjadi pengurangan pekerjaan.

2. Customer Experience pada poin ini dijelaskan bahwa service excellent bukan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan pengguna layanan, tetapi juga terkait rangkaian hal-hal yang dialami pengguna layanan saat akan melakukan kontak dengan kantor. Perlu diciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna layanan mulai dari mereka sebelum masuk ke kantor hingga keluar dari kantor. Banyak aspek yang dapat diperhatikan untuk membentuk customer experience yang memuaskan, contohnya apakah lingkungan kantor sudah bersih dan wangi, apakah petugas layanan sudah memberikan kesan yang baik, dan apakah sudah adanya prosedur yang jelas dalam pemberian layanan. Dengan memperhatikan customer experience ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. Komunikasi yang Excellence pada poin ini dijelaskan komunikasi yang dimaksud bukan hanya terkait komunikasi verbal tapi juga mencakup komunikasi non-verbal. (a) Komunikasi verbal Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal adalah apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pengguna layanan dengan baik dan memberi kesan positif. (b) Komunikasi non-verbal Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi non-verbal adalah terkait penggunaan kontak mata yang tepat, postur tubuh yang baik, dan penampilan saat menghadapi pengguna layanan.
4. Standar Layanan pada poin ini dijelaskan bahwa perlu dibuat suatu standar baku dalam pemberian layanan, adapun standar tersebut mencakup sikap, skill, dan penampilan petugas layanan.
5. Handling Complaint pada poin ini diberikan tips dalam menghadapi keluhan, seperti tetap berfikir positif, segera merespon, tawarkan solusi secara personal, bertanggung jawab tanpa menyalahkan rekan/kantor, dan segera tindaklanjuti. Sebaliknya sikap yang harus dihindari adalah seperti meningkatkan intonasi suara, bahasa tubuh yang defensif, membuat situasi semakin memanas, dan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.

Dalam menerapkan service excellent banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, dimana hal itu bukan hanya tanggung jawab petugas layanan saja akan tetapi juga tanggung jawab seluruh pegawai KPKNL Padang. Semoga dengan diselenggarakannya sosialisasi ini dapat meningkatkan kinerja KPKNL Padang dan meningkatkan kepuasan layanan kepada stakeholder.



13. Pengenalan Tusi KPKNL Padang ke Jajaran Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Padang, KPKNL Padang melakukan pengenalan tugas pokok dan fungsi KPKNL Padang sekaligus melakukan penggalian potensi piutang daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Rombongan KPKNL Padang yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Ahid Iwanudin diterima dengan baik oleh Sekretaris Daerah Pemkab Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan beserta jajaran pejabat dan pegawai lingkup Pemkab Kepulauan Mentawai.

Dalam diskusi yang berlangsung santai namun serius, Ahid Iwanudin mengenalkan jajaran Pejabat/Pegawai KPKNL Padang yang ikut hadir pada kesempatan tersebut serta menjelaskan beberap tusi terkait KPKNL Padang. Dari Pihak Pemkab Kepulauan Mentawai sangat antusias atas kehadiran KPKNL Padang dengan menjelaskan beberap tusi-nya yang dapat dilakukan kerjasama strategis terutama dalam hal pelayanan penilaian dan pengurusan Aset/BMD.



14. Pelaksanaan Hakordia Kemenkeu Satu Sumbar 2024

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2024 dan meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu Sumbar, KPKNL Padang bersama Kanwil DJPb Prov. Sumbar, KPPN Padang dan KPPBC Teluk Bayur melaksanakan Jalan Santai dari kompleks perkantoran di jati menuju Pantai Purus dan Giat Bersih Pantai yang dilaksanakan pada Jum'at pagi (6/12). Dengan tema Hakordia tahun 2024 yakni “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, acara perayaan Hakordia

ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan memaknai hari antikorupsi dan menerapkannya dalam pekerjaan serta menularkan kepada masyarakat. Perlu diketahui dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumbar, Syukriah HG mengapresiasi program sinergi Kemenkeu Satu Sumbar yang dapat menyelenggarakan kegiatan kolaborasi antar unit vertikal Kemenkeu di Kota Padang serta bermanfaat langsung untuk lingkungan sekitar, dikarenakan selain acara jalan santai dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat kegiatan ini juga mewujudkan lingkungan bersih dengan melakukan Giat Bersih Pantai yang mana akan diagendakan secara rutin/berkala. Ini merupakan kegiatan awal dari perayaan Hakordia 2024 Kemenkeu Satu Sumbar, karena ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya, diantaranya:

1. Kegiatan Bintal Rohani bersama dengan narasumber Dr. H. Suhefri St. Sulaiman, M.Ag. (Dosen UIN Imam Bonjol Padang) dan tema “antikorupsi mulai dari lifestyle-mu” pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pukul 14:30 s.d. 15:30 WIB (UIC KPPN Padang)
2. Kegiatan Bakti Sosial berupa Donor Darah bersama PMI Kota Padang yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 mulai pukul 09:00 WIB s.d. selesai. (UIC KPPBC Teluk Bayur)

yang mana kedua acara tersebut bertempat di Aula KPPN Padang Lt. 2, Jl. Perintis Kemerdekaan 79, Jati, Padang Timur.



15. Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024

Selasa, tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang mengadakan Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024 yang dihadiri oleh Perwakilan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Kantor Pertanahan Kota Padang, Kantor Pertanahan Kota Pariaman, Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman, Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan, Lantamal II Padang, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumbar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur, SNVT PJSA WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat, SNVT PJPA WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Kegiatan hari ini lebih difokuskan kepada monitoring capaian progres sertifikasi per satuan kerja dan per Kantor Pertanahan tahun 2024.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024 untuk kategori K1 memiliki target sebanyak 124 bidang pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk KPKNL Padang memiliki target sebanyak 77 bidang pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Realisasi sampai saat ini pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sertifikat sudah terbit, sedangkan pada Kantor Pertanahan lainnya telah dilakukan pengukuran, pengolahan PBT serta penerbitan Surat Ukur sehingga sertifikat dapat diterbitkan.



16. Penggalian Potensi Lelang pada PemKab Solok Selatan

Salah satu fungsi Lelang adalah untuk menggiatkan perekonomian melalui jasa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, non-eksekusi wajib maupun non-eksekusi sukarela dan kegiatan pra maupun pasca lelang semua jenis lelang. Proses lelang telah mampu menjadi penyumbang PNBPN lelang dan untuk mengoptimalkan Penerimaan

Negara dimaksud perlu dilakukan beberapa kegiatan Penggalan Potensi Lelang yang diinisiasi oleh Kantor Pusat DJKN dan Kantor Vertikal DJKN, dalam hal ini KPKNL Padang telah menginisiasi penggalan potensi lelang pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Diskusi penggalan potensi lelang pada Pemkab Solok Selatan dilaksanakan pada hari Senin (23/12) bertempat di ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Solok Selatan. Rombongan KPKNL Padang yang dipimpin oleh Ahid Iwanudin sebagai Kepala Kantor beserta Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama, Nurcahyo Hari Purnomo disambut dan diterima dengan baik oleh Kepala Bidang Aset BPKD Pemkab Solok Selatan, Masdera Riko beserta jajarannya.

Perlu diketahui, penggalan Potensi Lelang dapat dilakukan dengan cara dua cara, yakni:

1. Secara tidak langsung melalui Instansi Vertikal DJKN seperti Kanwil dan KPKNL serta Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II melalui pemberian bimbingan, arahan, dan dorongan kepada Kanwil dan KPKNL serta Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II. Hal ini perlu terus dilakukan untuk memastikan kesinambungan pemberian layanan serta untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut mampu melakukan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang di wilayah maupun cabang pemohon lelang agar subyek lelang seperti pemohon lelang dan pembeli lelang maupun obyek lelang dapat semakin berkembang jenis maupun frekuensinya.
2. Secara langsung kepada stakeholder pemohon lelang. Penggalan potensi lelang secara langsung dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dengan pemohon.lelang, terutama kantor pusat maupun kantor wilayah penjual lelang yang dapat berupa Kementerian Lembaga, BUMN/D, Perbankan, dan Perusahaan Swasta Nasional.



ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2024 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2024. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan reviu capaian kinerja

Dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2024 adalah 112,93. Namun terdapat satu buah IKU yang capaiannya kuning yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatalan lelang karena berkas tidak memenuhi syarat, adanya permintaan pembatalan lelang, dan adanya ancaman fisik terhadap pelaksanaan lelang.

RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2025

Memasuki tahun 2025 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2025:

1. Melaksanakan rapat persiapan Sertifikasi BMN
2. Melakukan sosialisasi terkait SBSK
3. Melakukan sosialisasi PMK Lelang No 122 Tahun 2023 dan Pengenalan Aplikasi Lelang Versi 2.
4. Melaksanakan penggalian potensi lelang
5. Melakukan pemanggilan Debitur dan Penerbitan Surat Paksa
6. Melaksanakan Rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan pihak Penyerah Piutang
7. Melakukan Peer Review untuk menghasilkan nilai yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan
8. Melakukan edukasi ke satker bersama seksi PKN terkait usulan nilai yang diajukan dalam kaitannya dengan pengelolaan BMN
9. Memastikan seluruh penyelesaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan SOP atau lebih cepat dari SOP
10. Melakukan monitoring terhadap kewajiban pegawai dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN
11. Melakukan koordinasi dengan pihak legal perbankan terkait gugatan pelaksanaan lelang
12. Melakukan monitoring Pelaksanaan Anggaran secara triwulanan Januari - Maret 2025

13. Melakukan koordinasi dan verifikasi keseluruhan seksi dan kelompok jafung untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang disusun

REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang

Pada tahun 2024, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp2.512.655.000. Dan hingga akhir 2024, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp2.406.849.111 atau total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 95,79%.

KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU AKHIR	REALISASI ANGGARAN
CD PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA DAN RISIKO			
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	4,500,000	4,200,000
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	3,118,000	3,025,000
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,575,000	4,345,000
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	51,484,000	49,399,000
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	72,900,000	72,736,592
4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	19,935,000	17,749,850
4798.ABA.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan	80,890,000	75,714,033
4798.BAE.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	50,128,000	50,087,176
4798.BAH.001	Risalah Lelang	24,369,000	24,170,880

4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,890,000	1,380,000
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	25,177,000	25,177,000
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	59,998,255
4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	52,935,000	52,348,594
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	60,934,000	56,436,937
4798.UAK.201	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan	26,985,000	26,821,145
WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	94,020,000	93,882,328
4700.EBA.002	Kerumahtangaan	69,585,000	59,840,379
4700. EBA.994	Layanan Perkantoran	1,691,551,000	1,621,340,707
4700. EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	54,930,000	53,726,700
4702. BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	26,655,000	25,630,225
4702. BMB.002	Kehumasan	13,372,000	13,256,000
4702. BMB.003	Pameran/Eksibisi	7,585,000	6,685,310

4704. EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	8,907,000	8,898,000
------------------	--------------------------------	-----------	-----------

**DATA CAPAIAN RINCIAN OUTPUT KPKNL PADANG
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

KOMPONEN	TARGET DALAM DIPA	SATUAN	REALISASI	
Subbagian Umum				
	12	Layanan	12	100.00%
Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100.00%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	8	160.00%
Seksi Hukum dan Informasi				
Layanan Bantuan Hukum	25	Perkara	51	204.00%
Pembinaan/Edukasi Publik	3	Orang	4	133.33%
Kehumasan	10	Kegiatan	19	190.00%
Pameran/Eksibisi	1	Kegiatan	1	100.00%
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara				
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	60	Orang	285	475.00%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	150	Surat Keputusan	259	172.67%
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	95	Rekomendasi	198	208.42%
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	2229	Rekomendasi	3334	149.57%
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	2	200.00%
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	580	Rekomendasi	2043	352.24%
Pengelolaan Aset BUN	25	Aset	25	100.00%
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	10	Aset	10	100%
Seksi Kepatuhan Internal				
Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Dokumen	7	140.00%

Seksi Piutang Negara				
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	20	Orang	29	145.00%
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	50	Surat Keputusan	104	208.00%
Jabatan Fungsional Penilai				
Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	10.921	109.21%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	150	Surat Keputusan	29	19.33%
Jabatan Fungsional Pelelang				
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60	Orang	75	125.00%
Risalah Lelang Sukarela UMKM	20	UMKM	22	110.00%
Risalah Lelang	320	Dokumen	662	206.88%
Penggalian Potensi Lelang	2	Rekomendasi	41	2050.00%

**PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO KPKNL PADANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI s.d. TRIWULAN IV (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Pagu Bruto	2.512.655.000	2.406.849.111	95,79%.
Faktor Pengurang			
Belanja Pegawai	-	-	
<i>Self Blocking</i>			
Hasil Efisiensi		105.815.889	
Dana Khusus	-	-	
Penyerapan Anggaran Neto	2.406.849.111	2.301.033.222	95.60%
TRAJECTORY PENYERAPAN ANGGARAN NETO TRIWULAN IV			95%
CAPAIAN INDIKATOR PENYERAPAN ANGGARAN NETO TRIWULAN IV			100,63%



DJKN

KPKNL
PADANG

BAB IV **PENUTUP**

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2024

BAB IV – PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2024 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2024 yang disusun untuk memenuhi asas good governance serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervise atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani di tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2024, hambatan eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2024 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada stakeholder terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap feedback dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas good governance dan bebas KKN.



DJKN

KPKNL
PADANG

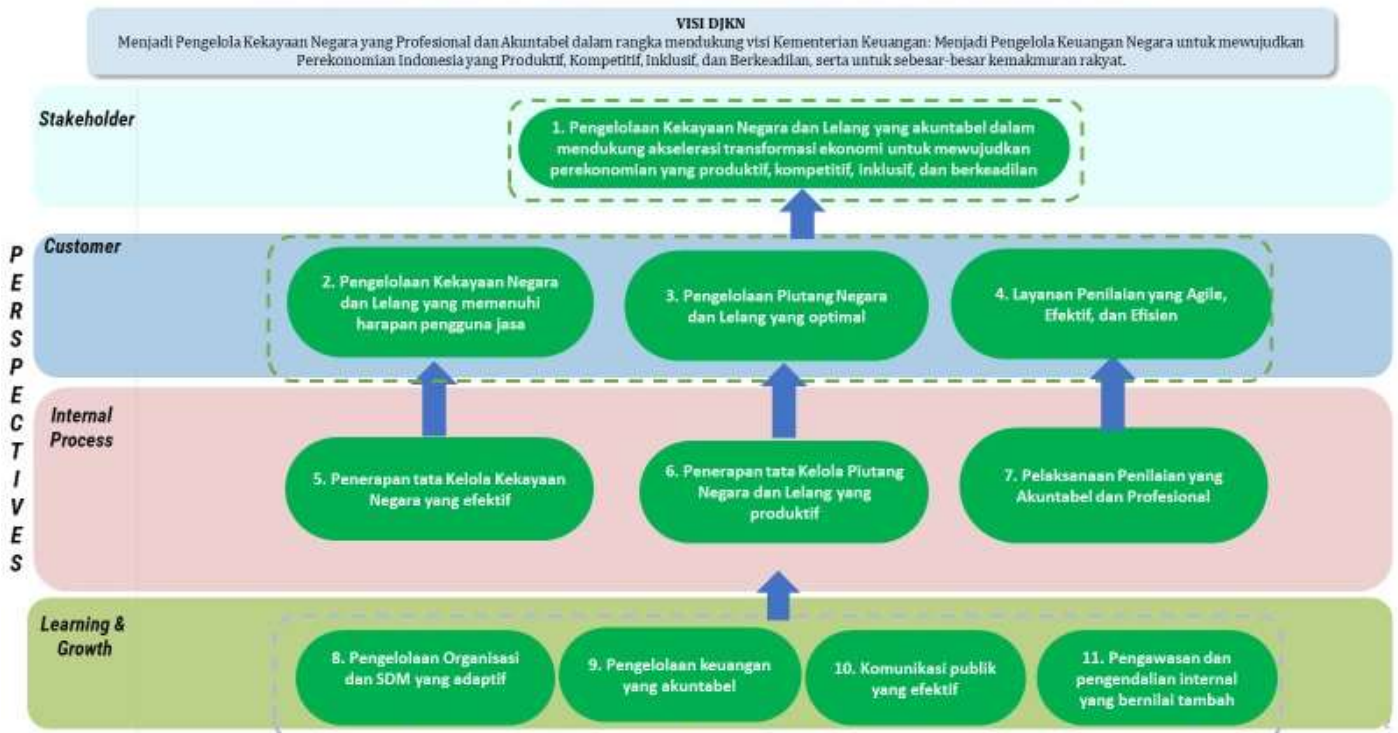
LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.03/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Indeks Integritas	89,17
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp 10,27 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp 89,85 M)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp 1,88 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62 (138)
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	519.365.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	12.193.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp	507.172.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp	1.966.605.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	94.020.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.816.066.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi public	Rp	47.612.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	8.907.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro



Ditandatangani Secara Elektronik
Ahid Iwanudin

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	62	62
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Padang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ahid Iwanudin



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ahid Iwanudin, S.H., M.M.	NAMA	Wahyu Prihantoro	
NIP	197102261998031001	NIP	197204171997031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 1.2 Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
		IKI 1.2 Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah	IKI 2.1 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan

	Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 2.2 Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Piutang Negara Dan Lelang Yang Optimal (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 3.1 Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan
		IKI 3.2 Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 4.1 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 5.1 Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		IKI 5.2 Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
		IKI 5.3 Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	Proses Bisnis
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Produktif (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 6.1 Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62	Proses Bisnis
		IKI 6.2 Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis

7	Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel Dan Profesional (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 7.1 Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
8	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 8.1 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		IKI 8.2 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 9.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		IKI 9.2 Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Komunikasi Publik Yang Efektif (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 10.1 Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah (Penugasan Dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau)	IKI 11.1 Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		IKI 11.2 Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik

Ahid Iwanudin

NIP 197102261998031001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Prihantoro

NIP 197204171997031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	28 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indek Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja Bmn (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi Bmn Idle	25	55	55	70	70	100	100
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	62	62
12	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin
NIP 197102261998031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro
NIP 197204171997031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-01A/WKN.03/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01/WKN.03/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1a-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
6a-CP	Persentase Saldo Berkas	96	90	90	81	81	62	62	6a-CP	Persentase Saldo Berkas	96	70	70	63	63	62	62

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,
dan Kepulauan Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Padang,



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
11	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
11	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	3	Tingkat kesesuaian penggunaan penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100	10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
11	Persentase Saldo Berkas	96	90	90	81	81	62	62	11	Persentase Saldo Berkas	96	70	70	63	63	62	62

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Kasus Piutang Negara									Kasus Piutang Negara							
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90	14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
20	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam berkelanjutan pembangunan ZI-WBK	-	-	-	-	-	100	100	20	Tingkat capaian unit kerja dalam berkelanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro





ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-01B/WKN.03/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01/WKN.03/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01A/WKN.03/2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (1,88 M)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (3,35 M)
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62 (138)	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	51 (113)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	70	70	63	63	62	62	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	70	70	63	63	51	51

Pekanbaru, 20 November 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,
dan Kepulauan Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Padang,



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (1,88 M)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	62 (138)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (3,35 M)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	51 (113)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	70	70	63	63	62	62	11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	70	70	63	63	51	51

Pekanbaru, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL PADANG
PERIODE s.d. Desember 2024**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											30,70%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									102,32%	
1a-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17	92,44	19,00%	57,58%	104%	104%	hijau	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	100,50%	14,00%	42,42%	100,50%	100,50%	hijau	
Customer Perspective (20%)											22,91%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa									117,80%	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/L	71,5%	93,38%	19,00%	50,00%	130,60%	120,00%	hijau	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/L	86,5%	100,00%	19,00%	50,00%	115,61%	115,61%	hijau	
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal									105,78%	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	91,55%	14,00%	50,00%	91,55%	91,55%	kuning	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	MAX	P/M	100%	145,74%	14,00%	50,00%	145,74%	120,00%	hijau	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,00%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	MAX	P/M	75	106,00	14,00%	100,00%	141,33%	120,00%	hijau	
Internal Process Perspective (25%)											29,50%
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif									114,04%	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/L	100%	120%	19,00%	40,43%	120,25%	120,00%	hijau	
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	122,67%	14,00%	29,79%	122,67%	120,00%	hijau	
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	MAX	P/M	100	100	14,00%	29,79%	100,00%	100,00%	hijau	
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									120,00%	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	62%	28,25%	14,00%	50,00%	154,43%	120,00%	hijau	
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	116,25%	14,00%	50,00%	130,62%	120,00%	hijau	
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120,00%	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN	P/M	16%	0,01%	14,00%	100,00%	199,94%	120,00%	hijau	
Learning and Growth Perspective (25%)											29,82%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									118,05%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	MAX	P/M	85	98,677	14,00%	50,00%	116,09%	116,09%	hijau	
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90	113,50	14,00%	50,00%	126,11%	120,00%	hijau	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120,00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	MAX	P/M	100	120	14,00%	50,00%	120,00%	120,00%	hijau	
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	MIN	P/M	10%	0%	14,00%	50,00%	200,00%	120,00%	hijau	
10	Komunikasi publik yang efektif									120,00%	
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX	P/M	80	100	14,00%	100,00%	125,00%	120,00%	hijau	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									119,13%	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	MAX	P/M	82	96,97	14,00%	50,00%	118,26%	118,26%	hijau	
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	MAX	P/M	100	120	14,00%	50,00%	120,00%	120,00%	hijau	
NKO											112,93%

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 1 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,507,425,000	0	2,051,629,615	355,219,496	2,406,849,111	95.99 %	100,575,889
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	540,820,000	0	417,386,514	106,202,948	523,589,462	96.81 %	17,230,538
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	12,193,000	0	9,220,000	2,350,000	11,570,000	94.89 %	623,000
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	12,193,000	0	9,220,000	2,350,000	11,570,000	94.89 %	623,000
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	4,500,000	0	3,050,000	1,150,000	4,200,000	93.33 %	300,000
100 Tidak Ada Komponen	4,500,000	0	3,050,000	1,150,000	4,200,000	93.33 %	300,000
100.0A Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/ di Bidang Barang Mllik Negara	4,500,000	0	3,050,000	1,150,000	4,200,000	93.33 %	300,000
521211 Belanja Bahan	4,500,000	0	3,050,000	1,150,000	4,200,000	93.33 %	300,000
000001. Makan Rapat Biasa	1,015,000	0	998,500	0	998,500	98.37 %	16,500
000002. Snack Rapat Biasa	1,890,000	0	456,500	1,150,000	1,606,500	85.00 %	283,500
000192. Souvenir	1,595,000	0	1,595,000	0	1,595,000	100.00	0
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	3,118,000	0	1,825,000	1,200,000	3,025,000	97.02 %	93,000
100 Tidak Ada Komponen	3,118,000	0	1,825,000	1,200,000	3,025,000	97.02 %	93,000
100.0A Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Piutang Negara	3,118,000	0	1,825,000	1,200,000	3,025,000	97.02 %	93,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,118,000	0	1,825,000	1,200,000	3,025,000	97.02 %	93,000
000006. Uang Harian (Sumatera barat)	1,216,000	0	900,000	300,000	1,200,000	98.68 %	16,000
000007. Akomodasi (Sumatera Barat)	1,402,000	0	925,000	400,000	1,325,000	94.51 %	77,000
000008. Transportasi (Sumatera Barat)	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,575,000	0	4,345,000	0	4,345,000	94.97 %	230,000
100 Tidak Ada Komponen	4,575,000	0	4,345,000	0	4,345,000	94.97 %	230,000
100.0A Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang	4,575,000	0	4,345,000	0	4,345,000	94.97 %	230,000
521211 Belanja Bahan	4,575,000	0	4,345,000	0	4,345,000	94.97 %	230,000
000003. Makan Rapat Biasa	2,700,000	0	2,610,000	0	2,610,000	96.67 %	90,000
000004. Snack Rapat Biasa	1,872,000	0	1,735,000	0	1,735,000	92.68 %	137,000
000005. Penggandaan dan Penjilidan	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 2 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CD.4798 Pengelolaan Aset	528,627,000	0	408,166,514	103,852,948	512,019,462	96.86 %	16,607,538
AAH Peraturan lainnya	124,384,000	0	95,966,592	26,169,000	122,135,592	98.19 %	2,248,408
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	51,484,000	0	34,496,000	14,903,000	49,399,000	95.95 %	2,085,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	51,484,000	0	34,496,000	14,903,000	49,399,000	95.95 %	2,085,000
005.OA Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	18,539,000	0	8,535,000	8,682,000	17,217,000	92.87 %	1,322,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,499,000	0	6,075,000	6,162,000	12,237,000	90.65 %	1,262,000
000014. Uang Harian	6,891,000	0	3,600,000	2,190,000	5,790,000	84.02 %	1,101,000
000015. Akomodasi	5,608,000	0	1,775,000	3,764,000	5,539,000	98.77 %	69,000
000016. Transportasi	1,000,000	0	700,000	208,000	908,000	90.80 %	92,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,040,000	0	2,460,000	2,520,000	4,980,000	98.81 %	60,000
000017. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	5,040,000	0	2,460,000	2,520,000	4,980,000	98.81 %	60,000
005.OB Survey Lapangan dan Penilaian	32,945,000	0	25,961,000	6,221,000	32,182,000	97.68 %	763,000
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	910,000	396,000	1,306,000	65.30 %	694,000
000018. Penjilidan dan Pengandaan	2,000,000	0	910,000	396,000	1,306,000	65.30 %	694,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,385,000	0	17,491,000	5,825,000	23,316,000	99.70 %	69,000
000019. Uang Harian	9,120,000	0	7,800,000	1,300,000	9,100,000	99.78 %	20,000
000020. Akomodasi	10,515,000	0	7,190,000	3,325,000	10,515,000	100.00	0
000021. Transportasi	3,750,000	0	2,501,000	1,200,000	3,701,000	98.69 %	49,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	100.00	0
000022. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	100.00	0
AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	72,900,000	0	61,470,592	11,266,000	72,736,592	99.78 %	163,408
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	72,900,000	0	61,470,592	11,266,000	72,736,592	99.78 %	163,408
005.OA Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	72,900,000	0	61,470,592	11,266,000	72,736,592	99.78 %	163,408
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,700,000	0	57,630,592	10,906,000	68,536,592	99.76 %	163,408
000010. Uang Harian	43,776,000	0	36,188,000	7,500,000	43,688,000	99.80 %	88,000
000011. Akomodasi	21,112,000	0	17,978,592	3,106,000	21,084,592	99.87 %	27,408

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 3 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000012. Transportasi	3,812,000	0	3,464,000	300,000	3,764,000	98.74 %	48,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	3,840,000	360,000	4,200,000	100.00	0
000013. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	4,200,000	0	3,840,000	360,000	4,200,000	100.00	0
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	100,825,000	0	73,363,883	20,100,000	93,463,883	92.70 %	7,361,117
ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	19,935,000	0	10,749,850	7,000,000	17,749,850	89.04 %	2,185,150
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19,935,000	0	10,749,850	7,000,000	17,749,850	89.04 %	2,185,150
005.0A Implementasi Evaluasi Portofolio Aset	19,935,000	0	10,749,850	7,000,000	17,749,850	89.04 %	2,185,150
521211 Belanja Bahan	1,260,000	0	0	0	0	0.00 %	1,260,000
000029. Makan Rapat Biasa	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000030. Snack Rapat Biasa	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,675,000	0	10,749,850	7,000,000	17,749,850	95.05 %	925,150
000031. Uang Harian	8,208,000	0	4,950,000	2,950,000	7,900,000	96.25 %	308,000
000032. Transportasi	2,007,000	0	200,000	1,650,000	1,850,000	92.18 %	157,000
000033. Penginapan	8,460,000	0	5,599,850	2,400,000	7,999,850	94.56 %	460,150
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000034. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	0	0	0	0	0	0.00 %	0
ABA.003 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	80,890,000	0	62,614,033	13,100,000	75,714,033	93.60 %	5,175,967
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	80,890,000	0	62,614,033	13,100,000	75,714,033	93.60 %	5,175,967
005.0A Implementasi Evaluasi SBSK	80,890,000	0	62,614,033	13,100,000	75,714,033	93.60 %	5,175,967
521211 Belanja Bahan	1,284,000	0	1,260,000	0	1,260,000	98.13 %	24,000
000023. Snack Rapat Biasa	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00	0
000024. Makan Rapat Biasa	804,000	0	780,000	0	780,000	97.01 %	24,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,166,000	0	53,914,033	13,100,000	67,014,033	92.86 %	5,151,967
000025. Uang Harian	40,930,000	0	27,165,140	9,500,000	36,665,140	89.58 %	4,264,860
000026. Akomodasi	25,236,000	0	23,616,893	800,000	24,416,893	96.75 %	819,107

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 4 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000027. Transportasi	6,000,000	0	3,132,000	2,800,000	5,932,000	98.87 %	68,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,440,000	0	7,440,000	0	7,440,000	100.00	0
000028. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	7,440,000	0	7,440,000	0	7,440,000	100.00	0
BAE Pelayanan Publik kepada UMKM	50,128,000	0	33,362,176	16,725,000	50,087,176	99.92 %	40,824
BAE.301 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	50,128,000	0	33,362,176	16,725,000	50,087,176	99.92 %	40,824
100 Tidak Ada Komponen	50,128,000	0	33,362,176	16,725,000	50,087,176	99.92 %	40,824
100.0A Risalah Lelang Sukarela UMKM	50,128,000	0	33,362,176	16,725,000	50,087,176	99.92 %	40,824
521211 Belanja Bahan	3,280,000	0	3,280,000	0	3,280,000	100.00	0
000035. Penggandaan	3,280,000	0	3,280,000	0	3,280,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,848,000	0	26,482,176	15,325,000	41,807,176	99.90 %	40,824
000037. Akomodasi	1,800,000	0	1,650,000	150,000	1,800,000	100.00	0
000038. Transportasi	9,600,000	0	6,130,000	3,470,000	9,600,000	100.00	0
000039. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	30,448,000	0	18,702,176	11,705,000	30,407,176	99.87 %	40,824
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	0	3,600,000	1,400,000	5,000,000	100.00	0
000040. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	5,000,000	0	3,600,000	1,400,000	5,000,000	100.00	0
BAH Pelayanan Publik Lainnya	24,369,000	0	24,170,880	0	24,170,880	99.19 %	198,120
BAH.001 Risalah Lelang	24,369,000	0	24,170,880	0	24,170,880	99.19 %	198,120
100 Tidak Ada Komponen	24,369,000	0	24,170,880	0	24,170,880	99.19 %	198,120
100.0A Risalah Lelang	24,369,000	0	24,170,880	0	24,170,880	99.19 %	198,120
521211 Belanja Bahan	1,257,000	0	1,200,000	0	1,200,000	95.47 %	57,000
000041. Penggandaan dan Penjilidan	1,257,000	0	1,200,000	0	1,200,000	95.47 %	57,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,032,000	0	18,950,880	0	18,950,880	99.57 %	81,120
000042. Uang Harian	9,120,000	0	9,100,000	0	9,100,000	99.78 %	20,000
000043. Akomodasi	8,412,000	0	8,400,880	0	8,400,880	99.87 %	11,120
000044. Transportasi	1,500,000	0	1,450,000	0	1,450,000	96.67 %	50,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 5 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,080,000	0	4,020,000	0	4,020,000	98.53 %	60,000
000045. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	4,080,000	0	4,020,000	0	4,020,000	98.53 %	60,000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	141,002,000	0	117,179,021	21,724,828	138,903,849	98.51 %	2,098,151
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,890,000	0	0	1,380,000	1,380,000	47.75 %	1,510,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,890,000	0	0	1,380,000	1,380,000	47.75 %	1,510,000
005.0A Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	2,890,000	0	0	1,380,000	1,380,000	47.75 %	1,510,000
521211 Belanja Bahan	1,350,000	0	0	0	0	0.00 %	1,350,000
000046. Makan Rapat Biasa	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000047. Snack Rapat Biasa	450,000	0	0	0	0	0.00 %	450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,059,000	0	0	900,000	900,000	84.99 %	159,000
000048. Uang Harian	608,000	0	0	600,000	600,000	98.68 %	8,000
000049. Akomodasi	201,000	0	0	200,000	200,000	99.50 %	1,000
000050. Transportasi	250,000	0	0	100,000	100,000	40.00 %	150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	481,000	0	0	480,000	480,000	99.79 %	1,000
000051. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	481,000	0	0	480,000	480,000	99.79 %	1,000
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	25,177,000	0	23,377,000	1,800,000	25,177,000	100.00	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	25,177,000	0	23,377,000	1,800,000	25,177,000	100.00	0
005.0A Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian	8,400,000	0	7,320,000	1,080,000	8,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000	0	7,320,000	1,080,000	8,400,000	100.00	0
000067. Uang Harian	8,400,000	0	7,320,000	1,080,000	8,400,000	100.00	0
005.0B Survei DKPB	16,777,000	0	16,057,000	720,000	16,777,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,617,000	0	14,617,000	0	14,617,000	100.00	0
000068. Uang Harian	6,058,000	0	6,058,000	0	6,058,000	100.00	0
000069. Akomodasi	6,309,000	0	6,309,000	0	6,309,000	100.00	0
000070. Transportasi	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,160,000	0	1,440,000	720,000	2,160,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 6 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000071. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	2,160,000	0	1,440,000	720,000	2,160,000	100.00	0
FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	0	52,883,255	7,115,000	59,998,255	100.00	1,745
100 Tidak Ada Komponen	60,000,000	0	52,883,255	7,115,000	59,998,255	100.00	1,745
100.0A Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	0	52,883,255	7,115,000	59,998,255	100.00	1,745
521211 Belanja Bahan	9,691,000	0	9,690,255	0	9,690,255	99.99 %	745
000059. Penjilidan dan Penggandaan	9,691,000	0	9,690,255	0	9,690,255	99.99 %	745
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,308,000	0	43,193,000	7,115,000	50,308,000	100.00	0
000061. Uang Harian	16,708,000	0	10,100,000	6,608,000	16,708,000	100.00	0
000062. Transportasi	19,200,000	0	18,963,000	237,000	19,200,000	100.00	0
000063. Penginapan	14,400,000	0	14,130,000	270,000	14,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000064. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	52,935,000	0	40,918,766	11,429,828	52,348,594	98.89 %	586,406
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	52,935,000	0	40,918,766	11,429,828	52,348,594	98.89 %	586,406
005.0A Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L	52,935,000	0	40,918,766	11,429,828	52,348,594	98.89 %	586,406
521211 Belanja Bahan	5,040,000	0	3,540,000	935,000	4,475,000	88.79 %	565,000
000052. Makan Rapat Biasa	3,570,000	0	2,070,000	935,000	3,005,000	84.17 %	565,000
000053. Snack Rapat Biasa	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,575,000	0	35,038,766	8,536,234	43,575,000	100.00	0
000054. Uang Harian	19,152,000	0	15,319,844	3,832,156	19,152,000	100.00	0
000055. Transportasi	4,683,000	0	1,376,000	3,307,000	4,683,000	100.00	0
000056. Penginapan	19,740,000	0	18,342,922	1,397,078	19,740,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,320,000	0	2,340,000	1,958,594	4,298,594	99.50 %	21,406
000057. Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	4,320,000	0	2,340,000	1,958,594	4,298,594	99.50 %	21,406
FAK Pengelolaan Aset BUN	60,934,000	0	37,302,817	19,134,120	56,436,937	92.62 %	4,497,063
FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	60,934,000	0	37,302,817	19,134,120	56,436,937	92.62 %	4,497,063

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 7 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	60,934,000	0	37,302,817	19,134,120	56,436,937	92.62 %	4,497,063
005.0A Invetarisasi BMN eks BMN idle	660,000	0	660,000	0	660,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660,000	0	660,000	0	660,000	100.00	0
000072. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	660,000	0	660,000	0	660,000	100.00	0
005.0B Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain	60,274,000	0	36,642,817	19,134,120	55,776,937	92.54 %	4,497,063
521211 Belanja Bahan	1,090,000	0	0	0	0	0.00 %	1,090,000
000074. Makan Rapat Biasa	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000075. Snack Rapat Biasa	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
000076. Fotocopy dan Penjilidan	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,300,000	0	27,260,817	9,000,000	36,260,817	99.89 %	39,183
000078. Uang Balas Jasa Waker	36,000,000	0	27,000,000	9,000,000	36,000,000	100.00	0
000191. Pajak Bumi Bangunan	300,000	0	260,817	0	260,817	86.94 %	39,183
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,704,000	0	5,422,000	7,914,120	13,336,120	79.84 %	3,367,880
000081. Uang Harian	7,104,000	0	1,350,000	2,464,120	3,814,120	53.69 %	3,289,880
000082. Penginapan	6,400,000	0	4,072,000	2,300,000	6,372,000	99.56 %	28,000
000083. Transportasi	3,200,000	0	0	3,150,000	3,150,000	98.44 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,180,000	0	3,960,000	2,220,000	6,180,000	100.00	0
000086. Uang Transport Dalam Kota	6,180,000	0	3,960,000	2,220,000	6,180,000	100.00	0
UAK Pengelolaan Aset BUN	26,985,000	0	26,821,145	0	26,821,145	99.39 %	163,855
UAK.201 Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	26,985,000	0	26,821,145	0	26,821,145	99.39 %	163,855
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	26,985,000	0	26,821,145	0	26,821,145	99.39 %	163,855
005.0A Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti	26,985,000	0	26,821,145	0	26,821,145	99.39 %	163,855
521211 Belanja Bahan	1,475,000	0	1,375,505	0	1,375,505	93.25 %	99,495
000180. - Snack Rapat Biasa	525,000	0	450,000	0	450,000	85.71 %	75,000
000181. - Makan Rapat Biasa	950,000	0	925,505	0	925,505	97.42 %	24,495

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 8 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,600,000	0	5,595,640	0	5,595,640	99.92 %	4,360
000198. Rompi Satgas BLBI	5,600,000	0	5,595,640	0	5,595,640	99.92 %	4,360
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000184. Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,760,000	0	10,700,000	0	10,700,000	99.44 %	60,000
000186. - Uang Harian	4,560,000	0	4,500,000	0	4,500,000	98.68 %	60,000
000187. - Penginapan	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
000188. - Transport	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	100.00	0
000190. - Uang Harian	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	1,966,605,000	0	1,634,243,101	249,016,548	1,883,259,649	95.76 %	83,345,351
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	94,020,000	0	88,512,328	5,370,000	93,882,328	99.85 %	137,672
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,020,000	0	88,512,328	5,370,000	93,882,328	99.85 %	137,672
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	94,020,000	0	88,512,328	5,370,000	93,882,328	99.85 %	137,672
100 Tidak Ada Komponen	94,020,000	0	88,512,328	5,370,000	93,882,328	99.85 %	137,672
100.0A Layanan Bantuan Hukum	94,020,000	0	88,512,328	5,370,000	93,882,328	99.85 %	137,672
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,808,000	0	2,170,000	630,000	2,800,000	99.72 %	8,000
000087. Biaya Penanganan Perkara	2,808,000	0	2,170,000	630,000	2,800,000	99.72 %	8,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,212,000	0	60,472,328	1,700,000	62,172,328	99.94 %	39,672
000088. Akomodasi	27,256,000	0	27,255,374	0	27,255,374	100.00	626
000089. Transportasi	10,500,000	0	10,494,980	0	10,494,980	99.95 %	5,020
000090. Uang Harian	24,456,000	0	22,721,974	1,700,000	24,421,974	99.86 %	34,026
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,000,000	0	25,870,000	3,040,000	28,910,000	99.69 %	90,000
000091. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	29,000,000	0	25,870,000	3,040,000	28,910,000	99.69 %	90,000
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,816,066,000	0	1,498,916,548	235,991,238	1,734,907,786	95.53 %	81,158,214
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,761,136,000	0	1,445,189,848	235,991,238	1,681,181,086	95.46 %	79,954,914

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 9 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.002 Kerumahtangaan	69,585,000	0	36,741,577	23,098,802	59,840,379	86.00 %	9,744,621
100 Tidak Ada Komponen	69,585,000	0	36,741,577	23,098,802	59,840,379	86.00 %	9,744,621
100.0A Pelayanan Umum	69,585,000	0	36,741,577	23,098,802	59,840,379	86.00 %	9,744,621
521211 Belanja Bahan	6,770,000	0	4,489,000	555,000	5,044,000	74.51 %	1,726,000
000149. Makan Siang Rapat	3,205,000	0	1,434,000	175,000	1,609,000	50.20 %	1,596,000
000150. Snack Rapat	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	100.00	0
000193. Spanduk/Banner	1,290,000	0	1,280,000	0	1,280,000	99.22 %	10,000
000196. Cetak/Penjilidan	500,000	0	0	380,000	380,000	76.00 %	120,000
522151 Belanja Jasa Profesi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000197. Honorarium Service Quality Officer	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61,035,000	0	31,232,577	22,543,802	53,776,379	88.11 %	7,258,621
000151. Akomodasi	31,545,000	0	26,227,655	4,475,227	30,702,882	97.33 %	842,118
000152. Transportasi	11,250,000	0	2,304,922	8,000,000	10,304,922	91.60 %	945,078
000153. Uang Harian	18,240,000	0	2,700,000	10,068,575	12,768,575	70.00 %	5,471,425
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	880,000	0	120,000	0	120,000	13.64 %	760,000
000154. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	880,000	0	120,000	0	120,000	13.64 %	760,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,691,551,000	0	1,408,448,271	212,892,436	1,621,340,707	95.85 %	70,210,293
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,691,551,000	0	1,408,448,271	212,892,436	1,621,340,707	95.85 %	70,210,293
002.0A Operasionalisasi Kantor	1,118,863,000	0	891,562,788	165,064,211	1,056,626,999	94.44 %	62,236,001
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	725,364,000	0	588,214,824	108,928,756	697,143,580	96.11 %	28,220,420
000092. Pakaian Dinas Pegawai	54,000,000	0	53,078,980	0	53,078,980	98.29 %	921,020
000093. Pakaian Dinas Satpam dan Pengemudi	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
000094. Pakaian Dians Pramubakti	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	100.00	0
000095. Honorarium Satpam dan Pengemudi	208,715,000	0	176,605,000	32,110,000	208,715,000	100.00	0
000096. Honorarium Pramubhakti	265,629,000	0	207,249,000	35,028,000	242,277,000	91.21 %	23,352,000
000097. Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	61,620,000	0	56,896,881	3,414,400	60,311,281	97.88 %	1,308,719

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 10 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000098. Jamuan Tamu	10,000,000	0	7,964,696	435,000	8,399,696	84.00 %	1,600,304
000194. Honorarium Cleaning Service	82,600,000	0	58,900,640	23,560,256	82,460,896	99.83 %	139,104
000199. Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Dinas	10,000,000	0	9,119,627	0	9,119,627	91.20 %	880,373
000200. Keperluan In House Training (IHT)	14,400,000	0	0	14,381,100	14,381,100	99.87 %	18,900
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,720,000	0	4,504,500	4,838,300	9,342,800	96.12 %	377,200
000099. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,720,000	0	4,504,500	4,838,300	9,342,800	96.12 %	377,200
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	0	5,487,500	777,500	6,265,000	65.26 %	3,335,000
000100. Biaya Pengiriman Surat	9,600,000	0	5,487,500	777,500	6,265,000	65.26 %	3,335,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94,176,000	0	64,904,000	12,556,000	77,460,000	82.25 %	16,716,000
000102. Honorarium Koordinator	1,800,000	0	1,000,000	200,000	1,200,000	66.67 %	600,000
000103. Honorarium Ketua/Wakil Ketua	1,440,000	0	800,000	160,000	960,000	66.67 %	480,000
000104. Honorarium Anggota	3,240,000	0	1,680,000	240,000	1,920,000	59.26 %	1,320,000
000106. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBPNBP	6,408,000	0	4,280,000	856,000	5,136,000	80.15 %	1,272,000
000107. Honorarium Bendahara Pengelola PNBPNBP	5,256,000	0	3,520,000	1,024,000	4,544,000	86.45 %	712,000
000108. Honorarium Anggota Pengelola PNBPNBP	15,552,000	0	13,200,000	2,320,000	15,520,000	99.79 %	32,000
000110. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	960,000	0	960,000	22.22 %	3,360,000
000112. Honorarium Staf PPK	7,200,000	0	2,964,000	1,782,000	4,746,000	65.92 %	2,454,000
000113. Honorarium Pejabat Pengadaan	4,896,000	0	4,080,000	816,000	4,896,000	100.00 %	0
000114. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	14,184,000	0	9,120,000	3,150,000	12,270,000	86.51 %	1,914,000
000115. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	13,752,000	0	13,260,000	0	13,260,000	96.42 %	492,000
000116. Honorarium Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	5,544,000	0	3,480,000	696,000	4,176,000	75.32 %	1,368,000
000117. Honorarium Bendahara Pengeluaran	4,824,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	76.62 %	1,128,000
000118. Honorarium Staf Pengelola	3,600,000	0	2,280,000	456,000	2,736,000	76.00 %	864,000
000120. Honorarium Penanggung Jawab	2,160,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	66.67 %	720,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	69,199,000	0	45,092,226	22,018,630	67,110,856	96.98 %	2,088,144

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 11 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000121. Materai	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000122. Persediaan Barang Konsumsi	900,000	0	510,000	0	510,000	56.67 %	390,000
000123. ATK dan Persediaan Komputer	67,299,000	0	43,582,226	22,018,630	65,600,856	97.48 %	1,698,144
522111 Belanja Langganan Listrik	190,500,000	0	171,969,625	15,109,106	187,078,731	98.20 %	3,421,269
000124. Belanja Langganan Listrik	190,500,000	0	171,969,625	15,109,106	187,078,731	98.20 %	3,421,269
522112 Belanja Langganan Telepon	8,304,000	0	1,954,102	413,982	2,368,084	28.52 %	5,935,916
000125. Belanja Langganan Telepon	8,304,000	0	1,954,102	413,982	2,368,084	28.52 %	5,935,916
522113 Belanja Langganan Air	12,000,000	0	9,436,011	421,937	9,857,948	82.15 %	2,142,052
000126. Belanja Langganan Air	12,000,000	0	9,436,011	421,937	9,857,948	82.15 %	2,142,052
002.0B Pemeliharaan Peralatan Mesin	231,556,000	0	188,588,350	36,768,225	225,356,575	97.32 %	6,199,425
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	231,556,000	0	188,588,350	36,768,225	225,356,575	97.32 %	6,199,425
000128. Pemeliharaan CCTV	2,000,000	0	700,000	1,200,000	1,900,000	95.00 %	100,000
000129. Pemeliharaan Jaringan	4,336,000	0	2,380,000	1,640,000	4,020,000	92.71 %	316,000
000131. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	149,456,000	0	136,041,559	13,284,725	149,326,284	99.91 %	129,716
000132. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10,680,000	0	9,129,858	511,000	9,640,858	90.27 %	1,039,142
000133. Pemeliharaan TV	6,500,000	0	2,264,392	3,435,000	5,699,392	87.68 %	800,608
000134. Pemeliharaan Proyektor	1,300,000	0	628,197	0	628,197	48.32 %	671,803
000135. Pemeliharaan Kamera	4,000,000	0	1,074,110	2,500,000	3,574,110	89.35 %	425,890
000136. Pemeliharaan Sound System	6,560,000	0	1,791,184	4,607,500	6,398,684	97.54 %	161,316
000137. Pemeliharaan Inventaris Perkantoran	2,400,000	0	1,777,800	310,000	2,087,800	86.99 %	312,200
000138. Pemeliharaan AC Split	23,350,000	0	16,150,000	5,250,000	21,400,000	91.65 %	1,950,000
000139. Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1,000,000	0	0	950,000	950,000	95.00 %	50,000
000140. Pemeliharaan Genset 750 Kva	19,974,000	0	16,651,250	3,080,000	19,731,250	98.78 %	242,750
002.0C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	294,802,000	0	291,386,033	2,635,000	294,021,033	99.74 %	780,967
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	294,802,000	0	291,386,033	2,635,000	294,021,033	99.74 %	780,967
000141. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	242,360,000	0	241,332,988	460,000	241,792,988	99.77 %	567,012

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 12 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Bertingkat (Sumatera Barat)	242,360,000	0	241,332,988	460,000			567,012
000142. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Sumatera Barat)	43,692,000	0	41,564,665	1,975,000	43,539,665	99.65 %	152,335
000143. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sumatera Barat)	8,750,000	0	8,488,380	200,000	8,688,380	99.30 %	61,620
002.TJ Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)	46,330,000	0	36,911,100	8,425,000	45,336,100	97.85 %	993,900
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,330,000	0	36,911,100	8,425,000	45,336,100	97.85 %	993,900
000144. Pemeliharaan Scanner	2,000,000	0	1,450,000	0	1,450,000	72.50 %	550,000
000145. Pemeliharaan Jaringan LAN Dropping 2023	1,000,000	0	0	850,000	850,000	85.00 %	150,000
000147. Pemeliharaan PC/Notebook	24,820,000	0	22,606,600	1,950,000	24,556,600	98.94 %	263,400
000148. Pemeliharaan Printer	18,510,000	0	12,854,500	5,625,000	18,479,500	99.84 %	30,500
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	54,930,000	0	53,726,700	0	53,726,700	97.81 %	1,203,300
EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	54,930,000	0	53,726,700	0	53,726,700	97.81 %	1,203,300
100 Tidak Ada Komponen	54,930,000	0	53,726,700	0	53,726,700	97.81 %	1,203,300
100.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran	54,930,000	0	53,726,700	0	53,726,700	97.81 %	1,203,300
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,930,000	0	53,726,700	0	53,726,700	97.81 %	1,203,300
000155. Mesin Antrian	36,450,000	0	36,408,000	0	36,408,000	99.88 %	42,000
000156. Lemari Penyimpanan	18,480,000	0	17,318,700	0	17,318,700	93.72 %	1,161,300
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	47,612,000	0	39,036,225	6,535,310	45,571,535	95.71 %	2,040,465
BMB Komunikasi Publik	47,612,000	0	39,036,225	6,535,310	45,571,535	95.71 %	2,040,465
BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	26,655,000	0	25,630,225	0	25,630,225	96.16 %	1,024,775
100 Tidak Ada Komponen	26,655,000	0	25,630,225	0	25,630,225	96.16 %	1,024,775
100.0A Pelaksanaan Hari Oeang	15,785,000	0	15,090,538	0	15,090,538	95.60 %	694,462
521211 Belanja Bahan	15,785,000	0	15,090,538	0	15,090,538	95.60 %	694,462
000157. Baju Seragam	9,950,000	0	9,881,538	0	9,881,538	99.31 %	68,462
000158. Pencetakan Pamflet	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000159. Snack	510,000	0	503,400	0	503,400	98.71 %	6,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 13 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000160. Makan Siang	3,375,000	0	3,155,400	0	3,155,400	93.49 %	219,600
000161. Pembuatan Spanduk dan Perlengkapan Lomba Lainnya	1,150,000	0	750,200	0	750,200	65.23 %	399,800
100.0B Pelaksanaan DJKN Goes to Campus	8,035,000	0	7,789,200	0	7,789,200	96.94 %	245,800
521211 Belanja Bahan	8,035,000	0	7,789,200	0	7,789,200	96.94 %	245,800
000162. Snack	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000163. Makan Siang	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000164. Goodie Bag DJKN Goes To Campus	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000195. Souvenir/Pencetakan	1,335,000	0	1,089,200	0	1,089,200	81.59 %	245,800
100.0C Public Campaign	2,835,000	0	2,750,487	0	2,750,487	97.02 %	84,513
521211 Belanja Bahan	2,835,000	0	2,750,487	0	2,750,487	97.02 %	84,513
000165. Snack	810,000	0	810,000	0	810,000	100.00	0
000166. Makan Siang	2,025,000	0	1,940,487	0	1,940,487	95.83 %	84,513
BMB.002 Kehumasan	13,372,000	0	13,256,000	0	13,256,000	99.13 %	116,000
100 Tidak Ada Komponen	13,372,000	0	13,256,000	0	13,256,000	99.13 %	116,000
100.0A Peliputan Berita Mengenai DJKN	13,372,000	0	13,256,000	0	13,256,000	99.13 %	116,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,372,000	0	7,296,000	0	7,296,000	98.97 %	76,000
000171. Akomodasi	2,808,000	0	2,796,000	0	2,796,000	99.57 %	12,000
000172. Transportasi	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000173. Uang Harian	4,064,000	0	4,000,000	0	4,000,000	98.43 %	64,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	5,960,000	0	5,960,000	99.33 %	40,000
000174. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	6,000,000	0	5,960,000	0	5,960,000	99.33 %	40,000
BMB.003 Pameran/Eksibisi	7,585,000	0	150,000	6,535,310	6,685,310	88.14 %	899,690
100 Tidak Ada Komponen	7,585,000	0	150,000	6,535,310	6,685,310	88.14 %	899,690
100.0A Pelaksanaan Pameran	7,585,000	0	150,000	6,535,310	6,685,310	88.14 %	899,690
521211 Belanja Bahan	7,585,000	0	150,000	6,535,310	6,685,310	88.14 %	899,690
000167. Snack	810,000	0	0	660,000	660,000	81.48 %	150,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537848 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Hal 14 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000168. Makan Siang	2,025,000	0	0	1,936,900	1,936,900	95.65 %	88,100
000169. Keperluan Pameran Lainnya	4,500,000	0	0	3,938,410	3,938,410	87.52 %	561,590
000170. Spanduk	250,000	0	150,000	0	150,000	60.00 %	100,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	8,907,000	0	7,778,000	1,120,000	8,898,000	99.90 %	9,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,907,000	0	7,778,000	1,120,000	8,898,000	99.90 %	9,000
EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	8,907,000	0	7,778,000	1,120,000	8,898,000	99.90 %	9,000
100 Tidak Ada Komponen	8,907,000	0	7,778,000	1,120,000	8,898,000	99.90 %	9,000
100.0A Implementasi Pengendalian Kepatuhan Internal	8,907,000	0	7,778,000	1,120,000	8,898,000	99.90 %	9,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,467,000	0	7,058,000	406,000	7,464,000	99.96 %	3,000
000175. Uang Harian	4,864,000	0	4,458,000	406,000	4,864,000	100.00	0
000176. Akomodasi	2,103,000	0	2,100,000	0	2,100,000	99.86 %	3,000
000177. Transportasi	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,440,000	0	720,000	714,000	1,434,000	99.58 %	6,000
000178. Uang Harian Dalam Kota Lebih dan 8 Jam	1,440,000	0	720,000	714,000	1,434,000	99.58 %	6,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

TIM PENYUSUN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

KPKNL Padang Tahun Anggaran 2024

Penanggung Jawab : Kepala Kantor (Ahid Iwanudin)

Ketua : Kasi HI (Mochamad Ramadani)

Penyusun : Tim Seksi HI

1. Darmansyah
2. Vidya Utami Putri
3. Checen Sulistyan
4. Guziariel Zul (PPNPN)
5. Rival Prasetyo (Mahasiswa Magang/Agribisnis 2022 Unand)

Kontributor:

1. Kasubang Umum (Mide Parma Swanda)
2. Kasi PKN (Fatih Ghozali)
3. Kasi PN (Ahmad Elazar)
4. Kasi KI (Silviana Oktarina)
5. Koordinator JF Pelelang (Santi Safaria)
6. Koordinator JF Penilai (Yunaldi Idris)
7. Resti Vita Masyuko
8. Ryan Erlangga